

OMBUDSMAN RI KALSEL LAKSANAKAN DISKUSI TEMATIK PROBLEMATIKA PENDANAAN PENDIDIKAN

Selasa, 14 November 2023 - Ita Wijayanti

Banjarmasin-Banyaknya laporan dan konsultasi yang disampaikan masyarakat di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, menyangkut dugaan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah pada tingkat menengah atas, di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, melalui Keasistenan Pemeriksaan melaksanakan kegiatan diskusi tematik membahas problematika pendanaan pendidikan, Senin (13/11/2023) di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kegiatan diskusi tematik dimaksud, disampaikan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Sopian Hadi, bahwa potensi pungutan pada jenjang sekolah menengah atas, selalu berulang dilaporkan di Ombudsman RI Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan alur koordinasi jelas terkait upaya pencegahan melalui pembinaan dan percepatan tindak lanjut laporan.

"Kami memahami bahwa sekolah ingin berinovasi, namun mesti tetap mematuhi ketentuan dalam pengelolaan dan penerapan pendanaan pendidikan, jangan sampai pungutan terjadi dengan kedok sumbangan, sehingga merugikan bagi orang tua/wali murid," kata Sopian Hadi dalam pengantar diskusi.

Setelah pemaparan materi disampaikan oleh kedua narasumber, kegiatan diskusi tematik kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan isu permasalahan yang dibahas. Beberapa poin penting disampaikan kedua narasumber, terutama terkait pencairan dan rencana aksi dari masing-masing *stake holder* untuk mencegah terjadinya pungutan berkedok sumbangan.

Sosialisasi penyampaian pengaduan terkait pengelolaan pendanaan pendidikan, berkomitmen akan lebih di masifkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, serta membentuk *focal point* dalam mempercepat penyelesaian pengaduan yang disampaikan masyarakat, kepada Ombudsman RI terkait permasalahan pendanaan pendidikan.

Kegiatan diskusi tematik tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, dan Kepala Kanwil Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin.